

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1. Pengertian sistem pengendalian internal

Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen dan personal lain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan entitas memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi pelaporan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Nugroho & Amalia, 2023)

SPI (Sistem pengendalian internal) merupakan proses berkelanjutan yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat oleh manajemen puncak, dewan direksi, dan seluruh karyawan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, menghasilkan laporan keuangan yang andal, dan mematuhi hukum dan peraturan. Sistem ini sangat penting dalam menjaga integritas informasi akuntansi, mencegah dan mengidentifikasi kesalahan atau penipuan, serta membina lingkungan organisasi yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Zamzami et al., (2023) Sistem pengendalian internal merupakan prosedur yang memiliki peran penting bagi perusahaan dalam meminimalkan bahkan mencegah timbulnya risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, sistem ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan seluruh staf bekerja sejalan dengan arahan dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal mencakup beragam aktivitas yang secara keseluruhan bertujuan menjaga agar operasional organisasi beroperasi sesuai tujuan serta arah yang telah ditetapkan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi otorisasi transaksi, pencatatan dan pelaporan

yang akurat, penyimpanan dokumen yang memadai, serta pemisahan tugas untuk mencegah konflik kepentingan. Lebih dari itu, keberadaan prosedur audit internal, pengawasan manajemen secara berkala, dan sistem pelaporan yang transparan juga merupakan bagian penting dari pengendalian yang efektif.

Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, sistem pengendalian internal berperan layaknya pagar pengaman—menjamin bahwa kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan oleh manajemen dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada komitmen manajemen puncak, pemahaman karyawan terhadap prosedur kerja, serta tersedianya dokumentasi yang jelas dan sistematis.

Jika diterapkan dengan baik, sistem pengendalian internal akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi, seperti meningkatnya akuntabilitas, berkurangnya kesalahan dan penyimpangan, serta tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebaliknya, lemahnya pengendalian internal dapat menyebabkan terjadinya kebocoran aset, manipulasi laporan keuangan, hingga kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam praktiknya, pengendalian internal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap organisasi. Organisasi kecil biasanya menggunakan sistem pengendalian yang sederhana dan langsung, sementara organisasi besar memerlukan sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara formal. Maka dari itu, penting bagi setiap organisasi di peruntukkan secara rutin melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internalnya, agar sistem tersebut tetap relevan dan mampu merespons tantangan operasional serta dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan dari sistem pengendalian internal menurut Amelia, N., & Prihanisetyo, A. (2023) yaitu :

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan.

Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk menurunkan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi perusahaan, khususnya dalam transaksi yang bernilai signifikan atau rentan terhadap manipulasi.

2. Memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi

Seiring meningkatnya skala dan kompleksitas operasional, pengawasan langsung dari pimpinan menjadi semakin terbatas. Dalam hal ini, SPI berfungsi memberikan keyakinan bahwa seluruh proses dan aktivitas perusahaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian

SPI, melalui fungsi audit internal, bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan pengendalian internal telah mendukung efisiensi biaya serta keberhasilan pencapaian target kerja.

4. Menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal
SPI memastikan bahwa seluruh proses kerja dijalankan selaras dengan rencana strategis perusahaan serta sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan manajemen.

5. Melindungi aset perusahaan dan menjamin akuntabilitasnya
Pengendalian internal mencakup sistem pengawasan terhadap aset perusahaan secara fisik maupun administratif, guna mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau penggelapan.

6. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam operasional organisasi
Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, SPI turut memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat tata kelola organisasi.

2.2. Neraca

2.2.1. Pengertian Neraca

Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aset, kewajiban, dan kekayaan pemilik yang pada waktu tertentu (Masdianti S.E.M.Si & Devi S.E.M.Si.Ak, Sunitha, 2024). Neraca pada umumnya di klasifikasikan dalam tiga kelompok utama yaitu aktiva (Aset), liabilitas (Kewajiban) dan ekuitas (Modal). Menurut Hery, (2018) Neraca (*balance sheet*) menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu titik waktu tertentu. Dengan menampilkan data tersebut, neraca berfungsi sebagai alat untuk menilai likuiditas perusahaan, struktur permodalannya, serta tingkat efisiensinya. Selain itu, neraca juga dapat digunakan untuk menghitung rasio pengembalian aset terhadap laba bersih perusahaan.

Menurut Salamony et al., (2024) menyatakan unsur pengukuran posisi keuangan adalah:

- a. Aktiva merujuk pada sumber daya yang saat ini dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sumber daya ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, yang mungkin berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas atau setara kas perusahaan. Contoh umum aktiva meliputi kas, piutang, persediaan, bangunan, dan mesin.
- b. Kewajiban adalah kewajiban saat ini perusahaan yang berasal dari transaksi atau peristiwa sebelumnya. Memenuhi kewajiban ini akan mengharuskan perusahaan untuk melepaskan sumber daya tertentu, yang akan mengurangi manfaat ekonomi perusahaan. Pada dasarnya, kewajiban adalah tanggung jawab perusahaan untuk mentransfer aset atau memberikan jasa di masa depan karena transaksi masa lalu. Contohnya termasuk utang dagang, utang bank, dan pendapatan yang ditangguhkan.

- c. Ekuitas mewakili sisa kepentingan dalam aset perusahaan setelah semua kewajiban dikurangkan. Dengan kata lain, ekuitas adalah nilai bersih yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik, yang terdiri dari kontribusi modal dan laba ditahan. Ekuitas mencerminkan apa yang tersisa bagi pemilik setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak luar.

Ketiga komponen ini aktiva, kewajiban, dan ekuitas diuraikan dalam neraca (atau laporan posisi keuangan), yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Aset menggambarkan semua sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban mencerminkan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan di masa mendatang, sedangkan ekuitas menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Neraca menjadi sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur keuangan perusahaan, termasuk sejauh mana operasional dibiayai oleh modal sendiri maupun utang. Melalui neraca, pengguna laporan keuangan seperti manajemen, investor, dan kreditur dapat menilai likuiditas perusahaan (kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek), struktur permodalan, dan efisiensi dalam penggunaan aset. Neraca juga digunakan sebagai dasar dalam menghitung berbagai rasio keuangan penting, seperti rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan *return on assets* (ROA). Dengan demikian, neraca tidak hanya memberikan informasi statis, tetapi juga berperan strategis dalam analisis dan pengambilan keputusan keuangan.

Laporan neraca yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan akurat. Neraca yang tersusun dengan baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas yang sehat. Artinya, aset yang dimiliki perusahaan cukup untuk menutupi seluruh kewajibannya, dan sisanya menjadi hak pemilik atau

pemegang saham. Kondisi ini menandakan bahwa perusahaan berada dalam keadaan likuid dan solvabel, yaitu mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tanpa harus mengorbankan aset penting. Ketika neraca menunjukkan posisi keuangan yang kuat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor, kreditor, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal karena perusahaan dianggap memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan dan risiko yang rendah. Demikian juga, kreditor seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya akan lebih mudah memberikan pinjaman karena perusahaan dianggap mampu mengelola dan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu.

Selain itu, neraca yang baik menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Informasi yang ditampilkan dalam neraca memungkinkan manajemen mengevaluasi efisiensi penggunaan aset, struktur modal, dan tingkat utang yang dimiliki perusahaan. Dari sini, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan, seperti pengelolaan utang yang lebih bijak, pengalokasian aset untuk kegiatan produktif, atau menentukan kebutuhan modal kerja di masa depan. Neraca juga menjadi dasar dalam perhitungan berbagai rasio keuangan penting, seperti *current ratio*, *debt to equity ratio*, dan *return on assets (ROA)*, yang berguna dalam mengukur kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian, neraca bukan hanya laporan statis, melainkan juga alat analisis yang sangat berharga untuk mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan secara finansial.

Dampak positif lainnya dari laporan neraca yang baik adalah meningkatnya citra dan reputasi perusahaan di mata publik, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang mampu menyajikan laporan neraca yang jelas, transparan, dan sesuai standar akuntansi akan dianggap profesional dan terpercaya. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. Di tengah persaingan

bisnis yang semakin ketat dan tantangan ekonomi yang fluktuatif, memiliki neraca yang sehat menjadi nilai tambah tersendiri. Neraca yang baik memberikan jaminan bahwa perusahaan mampu bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan neraca yang baik bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, memperkuat posisi pasar, dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

2.3. KOPERASI

2.3.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi berlandaskan prinsip-prinsip dasar seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai kontribusi, serta kemandirian dan tanggung jawab bersama. Dalam koperasi, keuntungan bukan menjadi tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat daya saing ekonomi anggota dan menciptakan keadilan sosial melalui kerja sama yang berkelanjutan.

Secara yuridis, pengertian koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan edukatif terhadap anggotanya.

Beberapa pengertian koperasi lainnya juga di kemukakan oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya yaitu:

- a. Menurut *International Cooperative Allience* (ICA) Koperasi merupakan suatu organisasi yang beranggotakan sekelompok individu yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka, melalui suatu badan usaha yang dimiliki bersama serta dikelola secara demokratis.(Rasyidi, 2018)
- b. Menurut Mohamad Hatta(2018), Koperasi didefinisikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Berdasarkan semangat “seorang buat semua dan semua buat seorang."
- c. Menurut Munkner, koperasi merupakan suatu organisasi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan melaksanakan kegiatan usaha secara kolektif. Aktivitas usaha yang dijalankan berorientasi pada tujuan ekonomi, bukan pada tujuan sosial sebagaimana terdapat dalam praktik gotong royong (Koperasi, (2024)

Dalam praktiknya, koperasi menjalankan berbagai aktivitas usaha seperti simpan pinjam, distribusi barang, jasa, hingga produksi, tergantung dari jenis dan kebutuhan anggota. Keunikan koperasi terletak pada struktur kepemilikannya yang kolektif, di mana setiap anggota mempunyai hak suara yang setara tanpa memandang jumlah modal yang disetor. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dan bertujuan menciptakan pemerataan hasil pembangunan.

Perkembangan koperasi dalam era modern semakin menuntut profesionalisme pengelolaan, inovasi pelayanan, dan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar koperasi seperti kejujuran, keterbukaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tetap menjadi fondasi utama yang membedakannya dari badan usaha komersial lainnya. Maka dari itu, koperasi dipandang sebagai pilar penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

2.3.2. Jenis-Jenis Koperasi

a. Koperasi Konsumen (*Consumer Cooperative*)

Koperasi konsumen adalah organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh para pengguna barang dan layanan dari koperasi tersebut. Mereka membeli barang/barang kebutuhan anggota (misalnya kebutuhan pokok atau produk sehari-hari) dalam jumlah besar (grosir), lalu mendistribusikannya kembali dengan harga lebih murah dan kualitas yang terjaga. Strukturnya berbasis keanggotaan: satu anggota, satu suara—menegaskan prinsip demokrasi ekonomi. Studi di tingkat internasional menyebut koperasi ini sebagai "retail co-op" dan kerap berfungsi layaknya supermarket milik anggota yang mementingkan kesetaraan dan pelayanan (Aathifah Fauziyyah, Amelia Suhada, Anisa Nurjanah, 2023)

a. Koperasi Produsen (*Producer Cooperative*)

Anggota koperasi produsen adalah para produsennya sendiri—petani, nelayan, pengrajin, atau produsen kecil lainnya. Mereka mengedepankan kemitraan dalam membeli input produksi (bibit, pupuk, alat), produksi bersama, dan pemasaran hasil ke pasar. Dalam praktiknya, koperasi jenis ini dapat berupa koperasi pertanian atau industri kecil. Di sektor pertanian, mereka sering disebut "*supply cooperative*" atau "*marketing cooperative*", yang membantu anggotanya mendapatkan efisiensi dalam distribusi dan memaksimalkan pendapatan.

b. Koperasi Simpan Pinjam (*Credit Cooperative*)

Koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro: mengumpulkan dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Fokus utamanya adalah mendorong budaya menabung dan mengatasi kesulitan akses pembiayaan formal, terutama bagi anggota berpenghasilan rendah. Penelitian dari Gorontalo menunjukkan bahwa jenis koperasi ini memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas pengendalian

internal dan tata kelola, dibanding tipe lainnya(Ririn Anggraeni, et al., 2025)

c. Koperasi Jasa (*Service Cooperative*)

Berbeda dari bentuk lainnya, koperasi jasa menyediakan layanan seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, rental, atau konsultasi. Anggota menjadi pengguna sekaligus pemilik atas layanan yang disediakan. Misalnya, koperasi angkutan umum atau koperasi klinik kesehatan yang melayani anggota. Model ini semakin relevan karena kebutuhan akan layanan komunitas yang efisien dan berbasis partisipasi anggota.

d. Koperasi Serba Usaha (KSU—*Multi-purpose Cooperative*)

KSU adalah kombinasi dari berbagai layanan—dari penjualan barang, jasa, hingga simpan pinjam—dalam satu entitas. Koperasi jenis ini umum dijumpai di desa-desa atau komunitas yang memiliki kebutuhan beragam. Mereka memberikan kemudahan akses dan layanan terpadu kepada anggota, sehingga sering menjadi solusi komprehensif untuk kebutuhan masyarakat lokal.

e. Koperasi Pekerja (*Worker Cooperative*)

Di koperasi pekerja, manajer dan pekerjanya adalah anggota sekaligus pemilik. Keputusan dilakukan secara demokratis: satu pekerja, satu suara. Model ini sangat menekankan egalitarianisme dan distribusi hasil usaha yang adil berdasarkan partisipasi kerja. Bukti empiris menyebut bahwa jenis koperasi ini cenderung lebih resilient terhadap krisis ekonomi dan mampu menjaga produktivitas yang baik(Rozy et al., 2023)

f. Koperasi Platform & Sosial (*Platform/Social Cooperative*)

Istilah platform cooperative mengacu pada koperasi digital—menggunakan platform daring, aplikasi, atau situs web untuk menjual barang atau layanan. Pengguna teknologi ini adalah anggota sendiri, bukan investor eksternal.Sementara koperasi sosial berfokus pada pelayanan sosial (misalnya perawatan lansia, pendidikan, atau integrasi

penyandang disabilitas). Korea, Italia, dan beberapa negara Eropa telah melegalkan bentuk ini sebagai model *multi-stakeholder cooperative*

g. Koperasi Tingkat (Primer, Sekunder, Gabungan, Induk)

Berdasarkan wilayah operasional dan struktur, koperasi dibagi menjadi:

1. Koperasi primer

Koperasi primer adalah bentuk paling dasar dan umum dalam sistem koperasi. Berdasarkan UU no. 25/1992 pasal 15, koperasi jenis ini dibentuk oleh paling sedikit 20 orang perorangan dan beranggotakan mereka sendiri. Karakteristiknya mencakup wilayah kerja yang terbatas—sekadar lingkungan RT, kelurahan, desa, atau satu instansi kerja (misalnya koperasi pegawai di suatu kantor). Prinsip “satu anggota satu suara” berlaku penuh untuk menegaskan demokrasi ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Signifikansi ilmiah: aktivitas koperasi primer langsung mencerminkan kebutuhan dan kepentingan anggota spesifik di komunitas lokal, menjadikannya objek studi penting dalam dinamika ekonomi kerakyatan.

2. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder terbentuk dari kesatuan beberapa koperasi primer.

Ada dua jenis:

- a. Pusat koperasi: beranggotakan minimal 5 koperasi primer yang sejenis (misalnya pus kud merupakan pusat bagi kud di suatu kabupaten) .
- b. Induk koperasi (sekunder-tertiar awal): koperasi yang menggabungkan beberapa koperasi sekunder pada tingkatan yang sama, bertujuan efisiensi organisasi dan peningkatan daya tawar .

Menurut Mulyani (2019), mengatakan pusat koperasi bertanggung jawab mengawasi perkembangan koperasi primer anggotanya, dan memiliki kewenangan untuk mengatasi maladministrasi, bahkan menghentikan keanggotaan jika ditemukan

penyimpangan ini mempertegas fungsi kontrol dan integrasi pada level sekunder.

3. Gabungan koperasi

Gabungan koperasi adalah langkah berikutnya, berupa organisasi yang mengkoordinir minimal 3 pusat koperasi dengan tujuan memperluas cakupan dan sumber daya. Gabungan ini berperan dalam pertukaran informasi, pelatihan, pembentukan jejaring, serta edukasi anggota. Contoh nyata adalah gabungan koperasi batik indonesia (GKBI) dan gabungan koperasi susu indonesia (GKSI) dalam riset terkini, model ini dianggap vital dalam memperkuat kapasitas kolektif dan meningkatkan profesionalisme manajemen koperasi di area regional.

4. Induk koperasi (tersier)

Tingkat tertinggi dalam sistem koperasi adalah induk koperasi, dibentuk dari minimal 3 gabungan koperasi. Fungsi utama mereka adalah menjadi ujung tombak hubungan koperasi nasional—bernegosiasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga internasional. Cakupannya berskala nasional atau internasional, dan contohnya antara lain koperasi induk pegawai pln (KIPPLN) atau induk koperasi unit desa (INKUD).

Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada jenis koperasi simpan pinjam dimana karena koperasi jenis ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung akses keuangan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. KSP memberikan solusi nyata terhadap permasalahan permodalan melalui sistem simpanan dan pinjaman berbunga ringan yang dikelola secara demokratis oleh dan untuk anggota. Selain itu, kegiatan KSP bersifat rutin dan terukur, sehingga lebih mudah dianalisis secara kuantitatif, baik dari segi keuangan, tata kelola, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan anggota.

Dari sisi penelitian, KSP juga menyediakan data yang lebih lengkap dan akuntabel karena diwajibkan menyusun laporan keuangan secara berkala. Peneliti dapat mengkaji aspek kinerja keuangan, efektivitas pengendalian internal, risiko kredit, partisipasi anggota, serta penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam manajemen keuangan. Selain itu, tingginya jumlah koperasi simpan pinjam aktif di Indonesia memperkuat relevansi dan urgensi kajian ini sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan fokus pada KSP, peneliti tidak hanya dapat memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan koperasi di sektor keuangan mikro.

2.4. Committee Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission (Coso)

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) merupakan sebuah inisiatif bersama dari lima organisasi profesi di Amerika Serikat yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja komprehensif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko perusahaan. Salah satu kontribusi utamanya adalah penerbitan Internal Control – *Integrated Framework* yang pertama kali dirilis pada tahun 1992 dan kemudian diperbarui pada tahun 2013. *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) dalam (Adi Prihanisetyo, 2023) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah “*Internal control is a systematic process implemented by the board of directors, management, and organizational personnel, intended to provide reasonable assurance for the attainment of objectives related to operations, financial reporting, and regulatory compliance*” Pengendalian internal merupakan sebuah proses, dan keefektifitasan direktur, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang reasonable untuk menjaga tercapainya tujuan yang berhubungan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Revisi pada tahun 2013 dikenal sebagai COSO 2013, yang dirancang untuk

menyesuaikan SPI dengan kompleksitas bisnis modern dan perubahan regulasi global.

COSO 2013 mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tiga tujuan utama, yaitu efektivitas serta efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Dalam pendekatan ini, pengendalian internal tidak dipahami sebagai aktivitas yang bersifat reaktif semata, tetapi sebagai bagian integral dari sistem manajemen yang proaktif dan berkelanjutan.

2.4.1 Komponen Utama COSO 2013

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan komponen fundamental yang menjadi dasar seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan nilai etika, integritas, dan komitmen organisasi terhadap kompetensi karyawan serta struktur organisasi yang jelas. Hal-hal seperti sikap pimpinan terhadap pengendalian, independensi dewan pengawas, dan sistem penghargaan serta hukuman mencerminkan bagaimana nilai organisasi dibentuk dan dijalankan. Penelitian oleh Setiyaviani dan Julian (2023) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan secara nyata meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan mengurangi risiko kesalahan material dalam pelaporan keuangan. (Setiyaviani & Julian, 2023)

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko mencakup proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, serta ditentukan strategi mitigasinya. COSO menekankan bahwa risiko harus dinilai dalam konteks tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi operasional, pelaporan, maupun kepatuhan. Penelitian oleh Sriyanto, Harsono, dan Chairina (2023) yang mengevaluasi

pengendalian atas dana desa di Deli Serdang mengungkapkan bahwa banyak desa belum menerapkan penilaian risiko secara formal, sehingga beberapa risiko seperti manipulasi anggaran atau keterlambatan realisasi anggaran cenderung terabaikan.

c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang bersifat nyata dan terstruktur yang dirancang untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Ini mencakup otorisasi transaksi, verifikasi data, pembatasan akses aset, dan rekonsiliasi berkala. Kegiatan ini harus dijalankan di seluruh tingkatan organisasi dan terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari. Dalam penelitian oleh Aulia dan Novita (2021) terhadap koperasi primer, ditemukan bahwa penerapan kegiatan pengendalian seperti *dual control* (dua tanda tangan), audit internal, dan pembatasan hak akses keuangan berdampak besar dalam mencegah terjadinya fraud serta meningkatkan akuntabilitas manajemen koperasi.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi adalah sarana untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan berkualitas dapat diperoleh dan didistribusikan secara tepat waktu ke semua pihak yang membutuhkan dalam organisasi. Sistem informasi internal harus mampu mendukung proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan dokumentasi, serta menjamin transparansi. Prodi Ibrahimy dan Mulyadi (2022) dalam kajiannya menekankan bahwa informasi yang terlambat atau tidak lengkap sering kali menjadi penyebab utama lemahnya pelaksanaan pengendalian internal, terutama dalam organisasi skala kecil seperti koperasi atau unit usaha daerah.

e. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal secara terus-menerus maupun melalui penilaian berkala. Monitoring mencakup tindakan seperti audit internal, evaluasi atas laporan keuangan, dan peninjauan kebijakan

pengendalian. Pemantauan juga memastikan bahwa kelemahan pengendalian dapat segera ditindaklanjuti. Ibrahimy dan Mulyadi (2022) juga menyatakan bahwa komponen pemantauan seringkali kurang maksimal karena keterbatasan tenaga ahli dan tidak adanya sistem pelaporan evaluasi berkala, padahal perannya krusial dalam menjaga keberlangsungan sistem pengendalian secara menyeluruh.

Salah satu ciri khas dari kerangka COSO 2013 adalah penekanan pada 17 prinsip dasar (*principles*) yang berada di bawah lima komponen utama tersebut. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar setiap entitas dapat menerapkan pengendalian internal secara menyeluruh dan terstruktur, serta menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan organisasinya. Dalam praktiknya, COSO 2013 juga relevan untuk berbagai jenis organisasi, tidak terbatas pada perusahaan besar atau entitas publik, tetapi juga koperasi, lembaga pendidikan, maupun organisasi non-profit.

Relevansi COSO 2013 semakin kuat dalam era tata kelola modern yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan risiko yang terukur. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kerangka COSO 2013 secara efektif dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, COSO 2013 tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk meningkatkan daya saing organisasi dalam jangka panjang.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun kajian teoritis dan metodologis, penting untuk menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan ilmiah dari topik yang dikaji. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan empiris yang menunjukkan bagaimana suatu kerangka teori telah diterapkan dalam berbagai konteks organisasi, serta membantu peneliti

memahami celah penelitian (*research gap*) yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga, berbagai penelitian mulai memfokuskan perhatian pada pentingnya sistem pengendalian internal sebagai alat manajemen risiko dan sarana penguatan tata kelola organisasi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah kerangka kerja pengendalian internal COSO 2013, yang terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan COSO 2013 mampu memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas organisasi, baik di sektor publik, koperasi, lembaga keuangan, maupun pemerintahan desa. Dalam konteks koperasi, misalnya, sistem pengendalian internal berbasis COSO tidak hanya mendorong akuntabilitas keuangan, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan usaha (*going concern*). Di sektor pemerintahan, penelitian terkait pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan ketidakefisienan anggaran.

Dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan tantangan penerapan sistem pengendalian internal. Hal ini menjadi dasar untuk merumuskan fokus penelitian saat ini, serta membedakan pendekatan, objek, atau variabel yang digunakan agar dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan organisasi.

Tabel 2.1 Peneliti terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ajeng Kusuma Ningsih & Menur Kusumaningtyas(Laila, 2013)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam	Metode kualitatif deskriptif. Teknik	Pengendalian internal dapat mengurangi klaim macet

		Meminimalkan Resiko Kredit Macet di Koperasi Prima Agung Sejahtera Surabaya	pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen internal koperasi.	dan meningkatkan kualitas kredit. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemantauan kredit dan sistem pencatatan yang belum optimal.
2	Jennifer Angelina Freda Likumahwa(Mananek e et al., 2015)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit pada KSP Pamardi Utomo Cabang Ungaran	Observasi dan wawancara terstruktur kepada pimpinan koperasi. Fokus pada struktur organisasi dan SOP.	Sistem pengendalian internal memiliki kelemahan di elemen risk assessment dan monitoring. Unsur-unsur pengendalian belum berjalan secara seimbang, sehingga dianggap tidak efektif.
3	Rineke Ernawati Mananeke, H. Eddy Soegiarto K., Adi	Evaluasi Sistem Pengendalian	Kuesioner, wawancara, dan observasi	Elemen pengendalian tidak berjalan

	Suroso(Adolph, 2016)	Intern Pinjaman Kredit pada Koperasi Karyawan Sarana Abadi Sejahtera di Samarinda	langsung. Evaluasi berdasarkan elemen COSO.	efektif. Fungsi kredit dan kasir digabung, tidak ada audit internal, dokumen tidak bernomor urut, tidak ada analisis kredit, dan pengawasan keuangan lemah.
4	Maria Grace Lusiana & Revi Arfamaini(Lusiana & Arfamaini, 2022)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit pada PT. Tri Teknik Perkasa	Metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi berdasarkan kerangka COSO.	Sistem pengendalian internal belum memadai. SOP belum jelas, terjadi piutang macet dan penggelapan dana oleh pegawai, serta dokumentasi transaksi tidak lengkap.
5	Maidani, Milda Handayani, Cahyadi Husadha(Maidani et al., 2020)	Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam	Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dan komparatif, di mana peneliti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal

		Ubhara Jaya	membandingkan sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh koperasi dengan teori sistem pengendalian internal yang ada. Objek dari penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam bagi anggotanya.	Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya belum berjalan baik dan tidak efektif. Ini disebabkan oleh beberapa faktor utama: belum adanya struktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas, serta kurangnya pemisahan tanggung jawab fungsional yang mengakibatkan tumpang tindih peran. Karyawan yang ada juga belum memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai untuk
--	--	-------------	---	---

				tugasnya, diperparah dengan rangkap jabatan struktural di universitas. Meskipun pencatatan sudah dilakukan, sistem masih manual dan ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan bukti transaksi, serta prosedur pinjaman yang tidak efektif. Selain itu, koperasi tidak memiliki staf auditor internal yang terpisah, sehingga pengawasan kurang optimal
--	--	--	--	---

2.6.Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

